

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Provinsi Kalimantan Selatan**

Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai provinsi berdiri sendiri pada 1 Januari 1957. Sejak era kolonial hingga kemerdekaan, wilayah ini khususnya Kota Banjarmasin merupakan episentrum politik, ekonomi, dan pemerintahan di kawasan Kalimantan. Peradaban Islam di wilayah ini dirintis oleh Pangeran Samudera melalui pendirian Kesultanan Banjar pada abad ke-17 di Banjarmasin, yang disusul gelombang perjuangan anti-kolonial pimpinan Pangeran Antasari hingga 1905.

Evolusi kebangsaan masyarakat Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh ekspansi organisasi seperti Syarikat Islam (1912) dan Persatuan Pemuda Borneo (1929). Pasca proklamasi 1945, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dimotori oleh BPRIK. Setelah melewati dinamika era pasca-Perjanjian Linggarjati dan pembubaran Negara Indonesia Timur pada 1950, Kalimantan Selatan kembali menegaskan integrasinya ke NKRI.

Perkembangan terkini mencatat pergeseran pusat administrasi daerah. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, status Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi dialihkan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru.

## **2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan**

### **a. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan**

Penyelenggaraan Pemilu 1955 menerapkan perpaduan antara sistem distrik dan perwakilan berimbang. Ciri khas dari sistem distrik yang digunakan mencakup pembagian wilayah negara atas distrik berdasarkan jumlah penduduk, penyetaraan jumlah kursi wakil rakyat dengan total distrik, penugasan satu wakil per distrik pemilihan, pemilihan kandidat yang diusung oleh organisasi peserta pemilu, serta penentuan kemenangan yang bertumpu pada perolehan suara terbanyak.<sup>1</sup>

### **b. Visi dan Misi KPU Provinsi Kalimantan Selatan**

Adapun visi KPU Provinsi Kalimantan Selatan adalah menjadi penyelenggara pemilu yang independen, profesional, dan berintegritas guna menjamin terselenggaranya pemilu berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Misi KPU Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel

---

<sup>1</sup> “KPU KALSEL - Sejarah KPU,” KPU KALSEL - Sejarah KPU, 7 Januari 2026, <https://kalsel.kpu.go.id/page/read/sejarah-kpu>.

<sup>2</sup> “KPU KALSEL - Visi Misi,” KPU KALSEL - Visi Misi, 7 Januari 2026, <https://kalsel.kpu.go.id/page/read/visi-misi>.

- b. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu.
  - c. menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
  - d. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan
  - e. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
  - f. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.
- c. Struktur Organisasi KPU Kalimantan Selatan

Pembagian divisi di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 2023–2028 secara resmi diatur dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Struktur Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan 2023 – 2028**

| No. | Nama                               | Jabatan                               | Divisi                                                                                         |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dr. Andi Tenri Sompia, SIP., M.Si. | Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan | Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik Wakil ketua Divisi Hukum dan Pengawasan |

|    |                                   |                                            |                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | M. Fahmi Failasopa,<br>M.Pd.,M.IP | Anggota KPU Provinsi<br>Kalimantan Selatan | Ketua Divisi Sosialisasi,<br>Pendidikan Pemilih,<br>Partisipasi Masyarakat, dan<br>Sumber Daya Manusia Wakil<br>ketua Divisi Perencanaan,<br>Data dan Informasi |
| 3. | Arif Mukhyar,<br>M.Pub.II.Law.    | Anggota KPU Provinsi<br>Kalimantan Selatan | Ketua Divisi Perencanaan,<br>Data dan Informasi Wakil<br>ketua Divisi Keuangan,<br>Umum, Rumah Tangga dan<br>Logistik                                           |
| 4. | Nida Guslaili<br>Rahmadina, S.Pd. | Anggota KPU Provinsi<br>Kalimantan Selatan | Ketua Divisi Teknis<br>Penyelenggaraan Wakil ketua<br>Divisi Sosialisasi, Pendidikan<br>Pemilih, Partisipasi<br>Masyarakat, dan Sumber Daya<br>Manusia          |
| 5. | Riza Anshari, M.Si.               | Anggota KPU Provinsi<br>Kalimantan Selatan | Ketua Divisi Hukum dan<br>Pengawasan Wakil ketua<br>Divisi Teknis<br>Penyelenggaraan                                                                            |

**Tabel 4. 2 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan**

| No. | Nama                     | Jabatan                                          | Ket |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------|-----|
| 1.  | Hj. Haslinda, S.E., M.M. | Sekretariat KPU Provinsi<br>Kalimantan Selatan   |     |
| 2.  | Sariyanti, S.Sos.        | Kepala Bagian Perencanaan, Data<br>dan Informasi |     |
| 3.  | Huriarahman, S.H.        | Kepala Bagian Keuangan, Umum<br>dan Logistik     |     |

|     |                                            |                                                                                                          |  |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4.  | Indriawan Adrak, S.T.                      | Kepala Bagian Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu,<br>Partisipasi dan Hubungan<br>Masyarakat, Hukum dan SDM |  |
| 5.  | Hj. Siti Norsalamah, S.Sos.,<br>M.M.       | Kepala Sub Bagian Perencanaan                                                                            |  |
| 6.  | Kiki Rizky Fitrianty, S.E.,<br>M.I.P.      | Kepala Sub Bagian Data dan<br>Informasi                                                                  |  |
| 7.  | Farida Kusuma Wardhani,<br>S.Pi., M.I.Kom. | Kepala Sub Bagian Umum dan<br>Logistik                                                                   |  |
| 8.  | Arie Effendy, S.E                          | Kepala Sub Bagian Keuangan                                                                               |  |
| 9.  | Evrilia Nana Norfaqih, S.E                 | Kepala Sub Bagian Hukum dan<br>SDM                                                                       |  |
| 10. | Hendry Gunawan, S. Kom.                    | Kepala Sub Bagian Teknis<br>Penyelenggara Pemilu, Partisipasi<br>dan Hubungan Masyarakat                 |  |

## B. Penyajian Data

Bab ini menyajikan temuan hasil wawancara langsung dengan para narasumber, mencakup Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan, pihak Kesekretariatan KPU, pemilih aktif pada Pemilu 2024, serta kelompok golput. Paparan data penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut:

## 1. Uraian Hasil Wawancara

### a) Informan 1

#### 1) Identitas Informan

Nama : M. Fahmi Failasopa, M.Pd., M.IP.

Jabatan : Anggota KPU Prov. Kalimantan Selatan/ Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Wakil ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

#### 2) Uraian

Fahmi Failasopa menyampaikan mengenai bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh KPU khususnya KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilpres 2024, jadi di 2024 upaya kita meningkatkan partisipasi pemilih untuk hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) kita melakukan upaya sosialisasi, selain sosialisasi kita juga menjalankan program yang secara hierarki dari KPU RI di dalam bentuk kebijakan kebijakan. Untuk sosialisasi itu sendiri mengangkat dari kearifan lokal daerah, kemarin kebijakannya itu adalah kirab pemilu yang diambil KPU RI dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Kalimantan memiliki 13 satuan kerja, karena Kalimantan Selatan mempunyai 13 kabupaten/kota, dari ke 13 satuan kerja satu-satu satuan

kerja yang ada melakukan kirab pemilu. Konsepnya itu mengangkat kearifan lokal di daerah masing-masing, misalkan di Kalimantan selatan ini masyarakat kita dominan berada di bantaran sungai, jadi kirab pemilunya tidak kita lakukan di jalan raya, tetapi menyusuri sungai. Selama menyusuri sungai kami mengarak bendera partai politik, dan menyosialisasikan tanggal pemungutan suara pemilu. Selain sosialisasi menyusuri sungai, kami juga melakukan sosialisasi sampai ke basis pemilih sampai tingkat kecamatan, sosialisasi itu dilakukan oleh jajaran KPU kabupaten/kota, jadi mereka melakukan sosialisasi tatap muka ke basis basis pemilih, seperti pemilih pemula di sekolah sekolah menengah ke atas. Sedangkan di tingkat provinsi, kami mengundang organisasi- organisasi kemasyarakatan, keagamaan, kemahasiswaan, kelompok disabilitas dan lain-lain. Hal itu kami selenggarakan di setiap tahapan, seperti tahapan pendaftaran daftar pemilih, tahapan kampanye, dan seterusnya.

Selain melakukan sosialisasi tatap muka, kami juga melakukan media sosialisasi melalui media cetak untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan media sosialisasi luar ruang, seperti koran, benner, baliho – baliho berisikan ajakan untuk mencoblos atau ajakan untuk datang ke TPS. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi melalui media elektronik seperti radio, tv, dan media elektronik lainnya. Termasuk juga sosialisasi secara tidak langsung, misalkan ada suatu media datang menanyakan sekarang sedang berlangsung tahapan apa, itu merupakan sosialisasi secara tidak langsung melalui pemberitaan media masa cetak atau *online*.

Informan menambahkan, KPU Provinsi hanya menerima laporan satuan kerja yang ada di tingkat Kabupaten/ kota, karena KPU Provinsi kewenangan atau perannya bersifat koordinatif, justru rekan kerja yang di tingkat kabupaten/ kota yang harus dominan dalam melakukan sosialisasi. Upaya meningkatkan partisipasi pemilih tidak hanya dilakukan KPU ditingkat Provinsi saja, tetapi seluruh satuan kerja KPU kabupaten/kota yang ada di Kalimantan juga ikut mengupayakan agar meningkatnya tingkat partisipasi pemilih, beberapa daerah memiliki inovasi masing – masing yang dilakukan dalam menyosialisasikannya. Seperti KPU Hulu Sungai Selatan (HSS), mereka melakukan sosialisasi melalui media sosial, mereka langsung mendatangkan tamu seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat di daerah daerah kecamatan untuk berdiskusi. Diskusi tersebut bisa berupa podcast yang selanjutnya di siarkan atau di upload di media sosial resmi milik KPU HSS. Misalkan juga seperti Tanah Laut, Kota baru, dan Hulu Sungai Utara mereka melakukan sosialisasi dengan lebih masif, dengan langsung turun ke lapangan, mereka menyampaikan informasi mengenai hari dan tanggal pemungutan suara, bagaimana menjadi pemilih, bagaimana agar terdaftar menjadi pemilih. Berbeda dengan sosialisasi yang dilakukan oleh rekan satuan kerja yang ada di perkotaan, seperti Banjarbaru dan Banjarmasin. Mereka langsung turun ke kecamatan kecamatan bersama dengan pemerintah daerah (Kesbangpol).

Upaya meningkatkan partisipasi pemilih tidak hanya dilakukan KPU ditingkat Provinsi saja, tetapi seluruh satuan kerja KPU

kabupaten/kota yang ada di Kalimantan juga ikut mengupayakan agar meningkatnya tingkat partisipasi pemilih

KPU Provinsi hanya menerima laporan satuan kerja yang ada di tingkat Kabupaten/ kota, karena KPU Provinsi kewenangan atau perannya bersifat koordinatif, justru rekan kerja yang di tingkat kabupaten/ kota yang harus dominan dalam melakukan sosialisasi.

Selanjutnya, informan menyampaikan mengenai kendala yang dihadapi KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan presiden, sebenarnya bisa dibilang tidak ada kendala yang berat, tidak ada kendala yang signifikan dalam proses meningkatkan partisipasi pemilih. Tetapi yang perlu di garis bawahi mengenai maset seorang pemilih, jadi di Kalimantan selatan ini maset masyarakat sedikit ada penyimpangan, seperti dalam pilpres itu, sebagian masyarakat biasanya mengharapkan ketika datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, itu berharap ada pemberian, ada imbalan, atau ada iming – iming agar datang ke TPS dan memilih calon tertentu. Itu merupakan menjadi tantangan. Sikap masyarakat yang apatis, pragmatis yang mengharapkan adanya imbalan atau pemberian ketika datang ke TPS merupakan permasalahan dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Kendala lain dalam proses pendaftaran atau pendataan daftar pemilih, tidak semua data pemilih itu akurat contohnya ketika kita melakukan pemutakhiran data pemilih di kota Banjarmasin, itu tidak semua pemilih bisa menggunakan hak pilih. Partisipasi itu bisa tinggi karena di

ukur dari data pemilih yang akurat, pemilih yang terpilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) tetapi dia tidak tahu dimana dia bisa menggunakan hak pilih, misal seseorang bekerja di kota Banjarmasin, dia terdaftar sebagai daftar pemilih tetapi dia berdomisili di kertak anyar yang notabennya masuk wilayah Kabupaten Banjar tetapi kartu tanda penduduknya di Banjarmasin, karena dia bekerja di Banjarmasin dia malas pergi ke TPS dan tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga menyebabkan partisipasi pemilih itu tidak mencapai target.

Kendala mahasiswa yang tidak mengetahui ketentuan menjadi daftar pemilih tambahan (DPTb), syaratnya dia harus terdaftar menjadi DPT di wilayah asalnya, ketika mahasiswa tersebut mengetahui dia terdaftar di DPT, mahasiswa tersebut bisa melakukan mekanisme pindah memilih. Itu merupakan sebuah kendala dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Misalkan mahasiswa berasal dari kabupaten Balangan berdomisili di Kota Banjarmasin dan dia terdaftar dalam DPT dia bisa melakukan pindah memilih ke Banjarmasin. Lebih lanjut, kendala juga berupa anggaran sosialisasi hanya ada di tingkat KPU Kabupaten/Kota, tidak sampai anggaran sosialisasi itu di letakkan sampai di tingkat kecamatan (PPK), sehingga terkadang sosialisasi tidak sampai ke pemilih yang di desa desa.<sup>3</sup>

## b) Informan 2

### 1) Identitas Informan

---

<sup>3</sup> M. Fahmi Failasopa (Anggota KPU Prov. Kalimantan Selatan/ Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Wakil ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi), wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 8 Agustus 2025

Nama : Hendry Gunawan, S. Kom.  
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis  
 Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan  
 Hubungan Masyarakat

## 2) Uraian

Informan menjelaskan bahwa peran media sosial sangat berpengaruh terhadap sosialisasi yang KPU lakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, dimana pada Pilpres tahun 2024 yang lalu kami secara konsisten memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pemilih untuk mencoblos ke TPS, lebih lanjut informan menuturkan mengenai banyaknya konten-konten menarik yang dibuat untuk bisa sampai kepada semua lapisan masyarakat seperti konten-konten atau tren yang sedang naik pada saat itu.

ketika ditanya mengenai adanya kerja sama dengan instansi atau pihak luar, informan menjawab bahwa KPU banyak melakukan kerja sama dengan berbagai macam instansi, kelompok masyarakat, kampus, organisasi kepemudaan, dan sekolah-sekolah dalam berbagai bentuk kerja sama, seperti mengadakan nobar di kampus-kampus film mengenai Pilpres dan rutin melakukan sosialisasi mengenai tahapan Pilpres agar masyarakat selalu ingat untuk mencoblos pada hari H nya nanti.

Mengenai inovasi sosialisasi yang dilakukan informan menyebutkan bahwa yang paling berbeda adalah penggunaan media sosial sebagai alat sosialisasi dengan membuat konten-konten yang sedang tren dan dihubungkan dengan Pilpres, kemudian juga kami beberapa kali melakukan

pembagian brosur sosialisasi dan juga suvenir di tempat-tempat strategis seperti pada saat CFD di siring nol kilometer.

Berhubungan dengan evaluasi dalam partisipasi pemilih pada Pilpres tahun 2024, informan menerangkan dimana target KPU Provinsi Kalimantan pada Pilpres adalah 85% partisipasi pemilih dimana pada hasilnya hanya menyentuh 82% tingkat partisipasi pemilih, dimana beberapa faktor menjadi hambatan dan evaluasi untuk Pilpres yang akan datang. Pertama, kecenderungan masyarakat yang beranggapan bahwa mereka hanya akan memilih jika ada uang atau pemberian dari salah satu calon yang menyebabkan banyak masyarakat yang tidak memilih karena alasan tidak mendapatkan keuntungan untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Kedua, faktor geografis juga berperan di beberapa daerah pedalaman yang masyarakat sulit untuk mengakses informasi mengenai Pemilihan atau pada saat hari pencoblosan susah untuk mendatangi TPS tempat mencoblos akibat infrastruktur yang tidak memadai.

Selain dua faktor diatas Hendri juga memaparkan faktor lain yang bisa mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih, yaitu masyarakat yang enggan untuk memilih karena sudah tidak percaya lagi dengan pemimpin atau bahkan KPU itu sendiri dan faktor teknis dimana pemilih tidak terdaftar dalam DPT sehingga jika tidak diurus maka akan kehilangan haknya untuk memilih.

Perihal pencegahan akan potensi kendala diatas KPU selaku penyelenggara pemilihan berupaya melakukan beberapa hal diantaranya,

dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan anak-anak muda untuk mengajak pemilih lain untuk tidak golput terutama dalam memilih presiden dan wakil presiden. kami juga secara rutin melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat yang rentan kehilangan hak pilihnya , seperti pemilih distabilitas dan juga pemilih pemula. kemudian juga kepada masyarakat umum secara keseluruhan.<sup>4</sup>

c) Informan 3

1) Identitas Informan

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama              | : Muhammad Maulidi                                                                      |
| Pekerjaan/Jabatan | : Mahasiswa UIN Antasari<br>Banjarmasin                                                 |
| Alamat            | : Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin<br>Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan<br>Selatan 70238 |
| Daerah Asal KTP   | : Balangan                                                                              |

2) Uraian

Informan menjelaskan bahwa dirinya terdaftar sebagai pemilih tetap pada Pemilu Presiden tahun 2024, namun tidak menggunakan hak pilihnya. Ketika ditanya lebih lanjut, informan mengungkapkan bahwa alasan utama tidak memilih adalah karena berada di luar daerah saat hari pemungutan

---

<sup>4</sup> Hendry Gunawan (Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat), wawancara oleh penulis, Banjarmasin 21 Agustus 2025

suara dan tidak sempat mengurus proses pindah memilih. Hal ini juga menjadi pengalaman pertama bagi informan tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Ia menambahkan bahwa kendala administratif dalam pengurusan pindah memilih, terutama terkait berkas yang harus disiapkan, menjadi hambatan utama yang dihadapinya sehingga akhirnya memutuskan untuk tidak ikut memilih.

Terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, informan mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan sosialisasi menjelang Pilpres 2024. Informan menyebutkan bahwa dirinya hanya mendapatkan informasi melalui media sosial, tanpa pernah mengikuti sosialisasi secara langsung seperti tatap muka, penyuluhan di lingkungan masyarakat, maupun kegiatan lainnya. Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan masih kurang menarik dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, karena terlalu berfokus pada media sosial. Informan berpendapat bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses atau ketertarikan terhadap media sosial, sehingga informasi yang disampaikan tidak merata.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa meskipun sosialisasi dinilai kurang maksimal, informasi mengenai calon presiden dan wakil presiden tetap dapat dipahami dengan cukup jelas. Namun demikian, hal tersebut tidak cukup mendorong partisipasinya dalam pemilu karena kendala teknis yang dihadapi lebih dominan. Dalam hal ini, informan menilai bahwa upaya KPU seharusnya tidak hanya berfokus pada

penyampaian informasi, tetapi juga memperhatikan kemudahan prosedur administratif, khususnya terkait mekanisme pindah memilih.

Mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung golput, informan berpendapat bahwa selain kurang maksimalnya sosialisasi dari KPU, terdapat pula faktor dari dalam masyarakat itu sendiri, yaitu sikap acuh tak acuh terhadap pentingnya menggunakan hak pilih. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran politik masyarakat juga menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi pemilih.

Dalam hal harapan dan saran, informan menginginkan agar KPU Provinsi Kalimantan Selatan lebih aktif terjun langsung ke lapangan dalam melakukan sosialisasi, seperti ke kampus-kampus dan lingkungan masyarakat, sehingga informasi dapat tersampaikan secara langsung dan lebih efektif. Selain itu, informan juga menyarankan agar prosedur pindah memilih dapat dipermudah di masa mendatang agar tidak menjadi hambatan bagi pemilih yang berada di luar daerah. Informan menegaskan bahwa apabila ke depan terdapat perbaikan dalam hal sosialisasi dan kemudahan prosedur, maka dirinya bersedia untuk kembali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu berikutnya.<sup>5</sup>

#### d) Informan 4

##### 1) Identitas Informan

Nama : Muhammad Nauval

---

<sup>5</sup> Muhammad Maulidi (Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin), wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 10 September 2025

Pekerjaan/Jabatan : Helper Transportasi

Alamat : Guntung Manggis, Kecamatan  
Landasan Ulin, Kota Banjarbaru

Daerah Asal KTP : kabupaten Banjar

## 2) Uraian

Informan menjelaskan bahwa dirinya terdaftar sebagai pemilih tetap pada Pemilu Presiden tahun 2024, namun tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara. Ketika ditelusuri lebih lanjut, informan mengungkapkan bahwa alasan utama tidak memilih adalah karena berada di luar daerah dan tidak sempat mengurus administrasi pindah memilih. Selain itu, informan juga menyebutkan bahwa kurangnya pemahaman awal terkait prosedur pindah memilih membuat dirinya tidak mempersiapkan hal tersebut sejak jauh hari. Informan menambahkan bahwa ini bukan pertama kalinya ia tidak menggunakan hak pilih, karena pada Pilkada sebelum ini juga pernah menggunakan hak pilih.

Terkait sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, informan menyatakan bahwa dirinya pernah melihat adanya sosialisasi, namun hanya sebatas melalui media sosial dan tidak secara intens. Ia mengaku tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi secara langsung seperti penyuluhan di lingkungan masyarakat atau kegiatan tatap muka lainnya. Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan masih kurang menarik dan kurang interaktif, sehingga tidak cukup mendorong minat

masyarakat untuk terlibat lebih jauh. Informan juga menilai bahwa meskipun media sosial cukup membantu dalam penyebaran informasi, pendekatan tersebut belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif.

Lebih lanjut, informan mengungkapkan bahwa informasi mengenai calon presiden dan wakil presiden sebenarnya sudah cukup jelas dan mudah diakses, baik melalui media sosial maupun sumber informasi lainnya. Namun demikian, kejelasan informasi tersebut tidak menjadi faktor utama dalam menentukan partisipasinya. Dalam hal ini, informan menilai bahwa kemudahan akses terhadap layanan administratif, seperti pindah memilih, justru lebih berpengaruh terhadap keputusan untuk menggunakan hak pilih.

Mengenai alasan tetap memilih untuk golput, informan menegaskan bahwa kendala utama terletak pada proses administratif yang dirasa cukup rumit dan memerlukan waktu. Selain itu, informan juga menambahkan adanya faktor lain berupa kurangnya pengingat atau pemberitahuan secara langsung dari pihak penyelenggara terkait batas waktu dan prosedur pindah memilih. Hal ini membuat dirinya kurang terdorong untuk segera mengurus keperluan tersebut.

Dalam pandangan informan, selain kendala dari sisi penyelenggara, terdapat pula faktor dari masyarakat yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih, yaitu rendahnya kesadaran politik dan kurangnya rasa kepedulian terhadap proses pemilu. Sebagian masyarakat masih

menganggap bahwa satu suara tidak memberikan dampak yang signifikan, sehingga memilih untuk tidak berpartisipasi.

Adapun harapan dan saran yang disampaikan, informan menginginkan agar KPU Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya meningkatkan intensitas sosialisasi, tetapi juga memperluas metode penyampaian dengan melibatkan lebih banyak interaksi langsung dengan masyarakat, seperti melalui kegiatan di kampus, komunitas, maupun lingkungan tempat tinggal. Selain itu, informan juga menyarankan agar KPU menyediakan layanan yang lebih mudah dan fleksibel, misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital untuk proses pindah memilih agar lebih praktis. Informan menegaskan bahwa apabila terdapat perbaikan dalam hal tersebut, maka dirinya bersedia untuk menggunakan hak pilih pada pemilu berikutnya.<sup>6</sup>

e) Informan 5

1) Identitas Informan

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nama              | : Ahmad Zidan Ramadhan                                             |
| Pekerjaan/Jabatan | : Wiraswasta                                                       |
| Alamat            | : Pekapuran raya, Kecamatan<br>Banjarmasin Timur, kota Banjarmasin |
| Daerah Asal KTP   | : Banjarmasin                                                      |

---

<sup>6</sup> Muhammad Nauval (helper transportasi), wawancara oleh penulis, Banjarbaru, 15 September 2025

## 2) Uraian

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa informan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Presiden 2024. Keputusan untuk ikut memilih didorong oleh kesadaran sebagai warga negara serta keinginan untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kepemimpinan nasional. Informan juga menyampaikan bahwa meskipun ini bukan pertama kalinya ia mengikuti pemilu, partisipasinya pada pemilihan presiden tetap dianggap sebagai hal penting yang tidak boleh dilewatkan.

Dalam hal akses informasi, informan mengungkapkan bahwa ia memperoleh informasi mengenai jadwal dan lokasi pencoblosan melalui media sosial, berita *online*, serta informasi dari lingkungan sekitar. Selain itu, informan juga beberapa kali mengetahui adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, baik melalui pemasangan baliho di sepanjang jalan maupun kegiatan sosialisasi yang pernah dilaksanakan di kawasan Siring Banjarmasin. Meskipun tidak selalu mengikuti secara langsung kegiatan tersebut, keberadaan sosialisasi tersebut dinilai cukup membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Lebih lanjut, informan menilai bahwa bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh KPU sudah cukup beragam dan relatif mudah dipahami, terutama melalui media visual seperti baliho dan media sosial. Namun demikian, menurutnya efektivitas sosialisasi masih dapat ditingkatkan, khususnya dalam hal pendekatan yang lebih interaktif agar dapat menarik

minat generasi muda untuk lebih aktif memahami proses pemilu. Informan juga menyampaikan bahwa dirinya tidak secara langsung mengikuti kegiatan sosialisasi formal seperti forum warga atau pendidikan pemilih, namun tetap mendapatkan informasi dari paparan yang ada di ruang publik.

Dari segi persepsi terhadap penyelenggaraan pemilu, informan memberikan penilaian positif terhadap peran Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan Pemilu Presiden 2024. Ia menilai bahwa proses pemungutan suara di TPS berjalan dengan tertib, lancar, dan cukup transparan. Petugas penyelenggara di lapangan juga dinilai mampu memberikan arahan yang jelas kepada pemilih, sehingga memudahkan proses pencoblosan, terutama bagi masyarakat yang mungkin masih kurang memahami prosedur.

Dalam evaluasinya, informan menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilu Presiden 2024 memiliki beberapa hal positif, di antaranya kelancaran proses pemungutan suara dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Namun, ia juga memberikan saran agar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dapat lebih memperluas jangkauan sosialisasi, tidak hanya melalui media konvensional seperti baliho, tetapi juga dengan memperkuat pemanfaatan media digital dan kegiatan langsung yang lebih menjangkau kalangan muda.

Terakhir, informan menyatakan bahwa ia memiliki komitmen untuk tetap menggunakan hak pilihnya pada pemilu selanjutnya. Pengalaman dalam mengikuti pemilu memberikan pemahaman yang lebih baik

mengenai pentingnya partisipasi politik, sehingga mendorongnya untuk terus berperan aktif dalam setiap pelaksanaan pemilu di masa yang akan datang.<sup>7</sup>

f) Informan 6

1) Identitas Informan

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nama              | : Aulia Rahmah                                                          |
| Pekerjaan/Jabatan | : Pedagang                                                              |
| Alamat            | : Kelurahan Pelambuan, Kecamatan<br>Banjarmasin Barat, kota Banjarmasin |
| Daerah Asal KTP   | : Banjarmasin                                                           |

2) Uraian

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang merupakan mahasiswa dan pemilih pemula pada Pemilu Presiden 2024, diperoleh keterangan bahwa informan tersebut menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilu. Keikutsertaannya dalam memilih didorong oleh rasa ingin mencoba serta keinginan untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses demokrasi, mengingat ini merupakan pengalaman pertamanya dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan presiden. Informan juga menyampaikan bahwa sebelumnya ia belum pernah mengikuti pemilu,

---

<sup>7</sup> Ahmad Zidan Ramadhan (Wiraswasta), wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 17 November 2025

sehingga partisipasinya kali ini menjadi pengalaman baru yang dinilai cukup penting.

Dalam hal pengetahuan terkait pemilu, informan mengungkapkan bahwa informasi mengenai jadwal dan lokasi pencoblosan diperoleh melalui media massa, seperti berita *online*, serta dari percakapan di lingkungan pertemanan atau tongkrongan. Informan tidak mendapatkan sosialisasi secara langsung dari pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, baik dalam bentuk tatap muka maupun kegiatan formal lainnya. Meskipun demikian, ia mengetahui secara umum adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, meskipun tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut.

Lebih lanjut, informan menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU cukup membantu, terutama yang disampaikan melalui media digital dan pemberitaan, meskipun menurutnya penyampaian tersebut masih bisa ditingkatkan agar lebih menjangkau pemilih pemula seperti dirinya. Informan juga menyatakan bahwa ia tidak pernah mengikuti secara langsung kegiatan sosialisasi seperti forum warga atau pendidikan pemilih, melainkan hanya memperoleh informasi secara tidak langsung.

Dari segi persepsi terhadap penyelenggaraan pemilu, informan memberikan penilaian yang cukup positif terhadap peran Komisi Pemilihan Umum, khususnya dalam hal penyelenggaraan teknis pemilu. Ia menyampaikan bahwa proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berlangsung dengan tertib, lancar, dan adil. Petugas di TPS

dinilai mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga memberikan rasa nyaman bagi pemilih, terutama bagi pemilih pemula.

Dalam evaluasinya, informan menyebutkan bahwa salah satu hal positif dari pelaksanaan Pemilu Presiden 2024 adalah proses yang berjalan relatif tertib dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Namun demikian, ia juga memberikan saran agar KPU dapat meningkatkan intensitas dan jangkauan sosialisasi, khususnya kepada kalangan pemuda dan mahasiswa, dengan memanfaatkan media sosial secara lebih aktif dan kreatif. Hal ini dinilai penting agar informasi pemilu dapat lebih mudah diakses dan dipahami oleh pemilih pemula.

Terakhir, informan menyatakan bahwa ia memiliki niat untuk kembali menggunakan hak pilihnya pada pemilu selanjutnya. Pengalaman pertamanya dalam memilih memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi, sehingga mendorongnya untuk tetap berkontribusi dalam pemilu di masa mendatang.<sup>8</sup>

## 2. Matrik

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik sehingga dapat mempermudah untuk dipahami, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4. 3 Tabel Matrik**

| NO | Informan | Upaya | Kendala |
|----|----------|-------|---------|
|----|----------|-------|---------|

---

<sup>8</sup> Aulia Rahmah (pedagang), wawancara oleh penulis, Banjarmasin, 9 Oktober 2025

|   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | M. Fahmi<br>Failasopa,<br>M.Pd., M.IP. | <p>1. Melakukan <b>sosialisasi</b> berbasis <i>kearifan lokal</i> (contoh: kirab pemilu menyusuri sungai di Kalsel).</p> <p>2. <b>Sosialisasi tatap muka:</b><br/>1) oleh KPU kab/kota ke basis pemilih (pemilih pemula di SMA/SMK, masyarakat tingkat kecamatan). 2). oleh KPU provinsi dengan melibatkan ormas, tokoh agama, mahasiswa, kelompok distabilitas.</p> <p>3. <b>Media sosialisasi:</b> cetak (koran, baliho, spanduk), elektronik (radio, TV), media sosial, dan pemberitaan media massa.</p> <p>4. <b>Inovasi sosialisasi : di</b> HSS: podcast dengan tokoh masyarakat/agama, disiarkan di media sosial.. di Tanah Laut, Kotabaru, HSU:</p> | <p>1. <b>Mindset masyarakat:</b> sebagian pemilih pragmatis/apatis, mengharapkan imbalan (<i>money politics</i>).</p> <p>2. <b>Data pemilih tidak akurat:</b> masalah domisili dan kependudukan (contoh: warga Banjarmasin berdomisili di Banjar tetapi malas pulang memilih).</p> <p>3. <b>Mahasiswa tidak paham DPTb:</b> banyak yang tidak tahu mekanisme pindah memilih.</p> <p>4. <b>Anggaran terbatas:</b> dana sosialisasi hanya sampai tingkat kab/kota, tidak ke kecamatan/PPK, sehingga desa kurang tersentuh. memperlihatkan</p> |
|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                         | <p>sosialisasi lapangan, penyuluhan langsung. di Banjarbaru, Banjarmasin:</p> <p>sosialisasi bersama Pemda (Kesbangpol). yang ada di Balangan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>adanya basis sosial dan legitimasi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | Hendry Gunawan, S. Kom. | <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pemanfaatan media sosial</b> sebagai sarana utama sosialisasi, dengan membuat konten kreatif dan tren populer agar menarik bagi semua kalangan.</li> <li><b>Kerja sama dengan pihak eksternal:</b> kampus, sekolah, organisasi kepemudaan, ormas. Contoh: nobar film Pilpres di kampus, sosialisasi tatap muka.</li> <li><b>Inovasi sosialisasi:</b> pembagian brosur, suvenir di lokasi strategis (contoh CFD di siring Nol Kilometer).</li> <li><b>Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan anak muda</b></li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Mindset masyarakat pragmatis (hanya memilih jika ada imbalan).</li> <li>Faktor geografis (daerah pedalaman sulit akses informasi dan TPS).</li> <li>Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin maupun KPU.</li> <li>Faktor teknis: tidak semua memilih terdaftar dalam DPT.</li> </ol> |

|   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                  | <p>untuk mengajak pemilih lain agar tidak golput.</p> <p><b>5. Pendidikan pemilih secara rutin</b></p> <p>untuk kelompok rentan (pemilih pemula, distabilitas, masyarakat umum).</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | Muhammad Maulidi | <p><b>1. Pelaksanaan sosialisasi sebagai upaya utama KPU:</b></p> <p>KPU telah melakukan sosialisasi sebagai bentuk upaya meningkatkan partisipasi pemilih. Namun, berdasarkan hasil wawancara, sosialisasi yang dirasakan informan lebih dominan melalui media sosial, sehingga belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara luas. Mengirimkan surat ke instansi (kampus, rumah sakit, kantor pajak, perusahaan), memasang spanduk di</p> | <p><b>1. Kendala administratif dalam proses pindah memilih:</b></p> <p>Hambatan utama yang ditemukan adalah kesulitan dalam mengurus pindah memilih. Prosedur yang dianggap rumit dan memerlukan waktu menjadi faktor yang menyebabkan informan tidak menggunakan hak pilihnya..</p> <p><b>2. Keterbatasan jangkauan sosialisasi KPU:</b></p> <p>Informan tidak mengetahui adanya sosialisasi dari KPU,</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>kantor kelurahan dan kecamatan, serta aktif di media sosial.</p> <p><b>2. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi:</b></p> <p>Penggunaan media sosial menjadi salah satu strategi KPU dalam menyampaikan informasi terkait pemilu. Informan mengakui memperoleh informasi melalui media tersebut, termasuk mengenai calon presiden dan wakil presiden yang dinilai cukup jelas dan mudah dipahami.</p> <p><b>3. Keterbatasan sosialisasi secara langsung (tatap muka):</b></p> <p>Meskipun media sosial telah dimanfaatkan, kurangnya sosialisasi secara langsung menjadi kelemahan dalam upaya KPU. Informan tidak pernah</p> | <p>yang menunjukkan bahwa penyebaran informasi belum merata. Hal ini menjadi kendala internal bagi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih.</p> <p><b>3. Dominasi media sosial yang belum menjangkau semua kalangan:</b></p> <p>Ketergantungan pada media sosial sebagai sarana sosialisasi menyebabkan sebagian masyarakat tidak terjangkau, terutama yang memiliki keterbatasan akses atau kurang aktif di media tersebut.</p> <p><b>4. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat:</b></p> <p>Faktor eksternal juga menjadi kendala, yaitu adanya sikap</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | <p>mengikuti kegiatan sosialisasi tatap muka, yang menunjukkan bahwa pendekatan langsung kepada masyarakat masih belum optimal.</p> <p><b>4. Kebutuhan peningkatan pendekatan langsung ke masyarakat:</b></p> <p>Informan menyarankan agar KPU lebih aktif turun ke lapangan, seperti ke kampus dan lingkungan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan KPU perlu dikombinasikan antara metode <i>online</i> dan <i>offline</i> agar lebih efektif.</p> | <p>acuh tak acuh masyarakat terhadap pemilu. Rendahnya kesadaran politik ini turut mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih.</p> <p><b>5. Faktor mobilitas pemilih yang tinggi:</b></p> <p>Kondisi informan yang berada di luar daerah saat hari pemungutan suara menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat juga menjadi kendala. Ketika tidak diimbangi dengan kemudahan prosedur administratif, hal ini berpotensi meningkatkan angka golput.</p> |
| 4. | Muhammad Nauval | <p><b>1. Sosialisasi melalui media sosial sebagai upaya utama:</b></p> <p>KPU telah memanfaatkan media sosial dalam menyampaikan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>1. Kendala administratif dalam pindah memilih:</b></p> <p>Hambatan utama yang dialami informan adalah prosedur pindah memilih yang dianggap</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>informasi terkait pemilu. Informan mengaku pernah melihat sosialisasi tersebut, namun sifatnya tidak intens sehingga dampaknya masih terbatas.</p> <p>2. <b>Kejelasan informasi kandidat sudah cukup baik:</b></p> <p>Informasi mengenai calon presiden dan wakil presiden dinilai sudah jelas dan mudah dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi penyampaian informasi politik, KPU sudah cukup berhasil.</p> <p>3. <b>Kurangnya sosialisasi langsung kepada masyarakat:</b></p> <p>Informan tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi secara tatap muka. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan langsung kepada masyarakat</p> | <p>rumit dan kurang dipahami. Hal ini menjadi faktor utama tidak digunakannya hak pilih.</p> <p>2. <b>Kurangnya informasi teknis terkait prosedur pemilu:</b></p> <p>Meskipun informasi umum tersedia, penjelasan terkait aspek teknis seperti pindah memilih masih belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.</p> <p>3. <b>Minimnya intensitas dan jangkauan sosialisasi</b></p> <p>Sosialisasi yang dilakukan dinilai belum intens dan belum menjangkau masyarakat secara langsung, sehingga banyak informasi penting yang tidak diketahui oleh pemilih.</p> <p>4. <b>Tidak adanya sistem pengingat atau</b></p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      | <p>masih belum optimal dan perlu ditingkatkan.</p> <p>4. <b>Perlunya inovasi dalam metode sosialisasi dan pelayanan:</b></p> <p>Informan menilai sosialisasi kurang menarik dan kurang interaktif. Selain itu, diperlukan inovasi berupa layanan digital, khususnya dalam proses pindah memilih, agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.</p> | <p><b>pemberitahuan langsung:</b></p> <p>Informan menyoroti tidak adanya pengingat atau notifikasi dari KPU terkait tahapan pemilu, khususnya batas waktu pengurusan pindah memilih, yang menyebabkan kurangnya kesiapan pemilih.</p> <p>5. <b>Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat:</b></p> <p>Selain kendala dari KPU, faktor eksternal berupa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilih juga menjadi penyebab masih adanya golput.</p> |
| 5. | Ahmad Zidan Ramadhan | <p>1. <b>Pemanfaatan media sosial dan media informasi sebagai sarana sosialisasi:</b></p> <p>Informasi terkait jadwal dan lokasi</p>                                                                                                                                                                                                           | <p>1. <b>Kurangnya keterlibatan langsung masyarakat dalam sosialisasi:</b></p> <p>Informan tidak pernah mengikuti kegiatan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>pencoblosan diperoleh informan melalui media sosial, berita <i>online</i>, dan lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa KPU telah memanfaatkan media digital sebagai salah satu upaya dalam menyebarkan informasi pemilu.</p> <p>2. <b>Pelaksanaan sosialisasi melalui media luar ruang (baliho):</b></p> <p>Informan mengetahui adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan melalui pemasangan baliho di jalan. Keberadaan media visual ini dinilai cukup membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu.</p> | <p>sosialisasi secara langsung seperti forum warga atau pendidikan pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan tatap muka masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>2. <b>Efektivitas sosialisasi yang belum optimal:</b></p> <p>Meskipun sosialisasi sudah dilakukan melalui berbagai media, informan menilai efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi dinilai belum sepenuhnya mampu menarik perhatian, khususnya bagi kalangan muda.</p> <p>3. <b>Kurangnya pendekatan interaktif dalam sosialisasi:</b></p> <p>Metode sosialisasi yang ada dinilai</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>3. <b>Kegiatan sosialisasi di ruang publik:</b></p> <p>KPU juga melakukan sosialisasi di ruang publik seperti di kawasan Siring Banjarmasin. Meskipun informan tidak terlibat langsung, kegiatan tersebut tetap memberikan dampak dalam bentuk peningkatan pengetahuan secara tidak langsung.</p> <p>4. <b>Penyampaian informasi yang relatif mudah dipahami:</b></p> <p>Bentuk sosialisasi yang dilakukan dinilai cukup jelas dan mudah dipahami, terutama melalui media visual dan digital. Hal ini menunjukkan adanya upaya KPU dalam menyederhanakan informasi agar dapat diterima oleh masyarakat.</p> | <p>masih kurang interaktif, sehingga belum maksimal dalam meningkatkan pemahaman dan minat partisipasi pemilih, terutama pemilih pemula.</p> <p>4. <b>Keterbatasan jangkauan sosialisasi:</b></p> <p>Sosialisasi melalui baliho dan media publik memang ada, namun belum merata dan belum mampu menjangkau semua masyarakat secara optimal.</p> <p>5. <b>Perlunya penguatan strategi sosialisasi berbasis digital dan langsung:</b></p> <p>Informan memberikan masukan bahwa KPU perlu lebih mengoptimalkan media digital serta memperbanyak kegiatan sosialisasi langsung yang</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | <p><b>5. Upaya penyelenggaraan pemilu yang tertib dan transparan:</b></p> <p>Selain sosialisasi, KPU juga berupaya meningkatkan partisipasi melalui penyelenggaraan pemilu yang tertib, lancar, dan transparan di TPS. Hal ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga mendorong mereka untuk ikut berpartisipasi.</p> | <p>menyasar kalangan muda agar partisipasi pemilih dapat meningkat.</p>                                                                                                                                       |
| 6. | Aulia Rahmah | <p><b>1. Pemanfaatan media digital dan pemberitaan sebagai sarana sosialisasi:</b></p> <p>Informan memperoleh informasi terkait pemilu melalui berita <i>online</i> dan media digital. Hal ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi</p>                                                                              | <p><b>1. Tidak adanya sosialisasi langsung yang diterima informan:</b> Informan tidak pernah mengikuti sosialisasi secara tatap muka maupun kegiatan formal dari KPU. Hal ini menunjukkan bahwa jangkauan</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Kalimantan Selatan telah memanfaatkan media informasi sebagai salah satu upaya dalam menjangkau masyarakat, khususnya pemilih pemula.</p> <p>2. <b>Adanya kegiatan sosialisasi meskipun tidak diikuti secara langsung:</b></p> <p>Informan mengetahui adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, meskipun tidak terlibat langsung. Hal ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi telah dilakukan, namun belum sepenuhnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>3. <b>Penyampaian informasi yang cukup membantu bagi pemilih pemula:</b></p> <p>Sosialisasi yang disampaikan melalui</p> | <p>sosialisasi langsung masih terbatas.</p> <p>2. <b>Ketergantungan pada informasi tidak langsung:</b> Informasi yang diperoleh hanya berasal dari media digital dan lingkungan pertemanan. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum sepenuhnya terstruktur dan merata.</p> <p>3. <b>Kurangnya intensitas dan jangkauan sosialisasi kepada pemilih pemula:</b></p> <p>Meskipun sosialisasi ada, informan menilai bahwa penyampaiannya masih perlu ditingkatkan agar lebih menjangkau kalangan pemilih pemula, khususnya mahasiswa.</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>media digital dinilai cukup membantu dalam memberikan pemahaman dasar mengenai pemilu. Hal ini menunjukkan adanya upaya KPU dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat.</p> <p><b>4. Penyelenggaraan pemilu yang tertib dan memberikan rasa nyaman:</b></p> <p>Informan menilai bahwa proses pemungutan suara di TPS berjalan dengan tertib, lancar, dan adil. Hal ini menjadi salah satu upaya tidak langsung KPU dalam meningkatkan partisipasi, karena memberikan kepercayaan kepada pemilih, terutama pemilih pemula.</p> <p><b>5. Peningkatan kesadaran partisipasi</b></p> | <p><b>4. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan edukasi pemilih:</b> Informan tidak pernah mengikuti kegiatan seperti forum warga atau pendidikan pemilih, yang menunjukkan bahwa partisipasi dalam kegiatan edukatif masih rendah.</p> <p><b>5. Perlunya peningkatan kreativitas dan inovasi dalam sosialisasi:</b></p> <p>Informan menyarankan agar KPU lebih aktif dan kreatif dalam memanfaatkan media sosial untuk menarik perhatian generasi muda, sehingga informasi pemilu dapat lebih mudah dipahami dan diakses.</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p><b>melalui pengalaman pertama memilih:</b></p> <p>Pengalaman pertama dalam menggunakan hak pilih memberikan dampak positif terhadap kesadaran politik informan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu turut mendorong partisipasi berkelanjutan.</p> |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### C. Analisis Data

#### 1. Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Presiden 2024

##### a. Strategi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Temuan wawancara mengungkapkan beragam langkah KPU Kalsel dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Pilpres 2024. Strategi tersebut meliputi kegiatan edukasi dan sosialisasi berbasis media daring maupun luring, serta sinergi bersama elemen masyarakat seperti ormas, komunitas distabilitas, tokoh agama, institusi pendidikan, dan pemilih pemula. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Selatan

tidak hanya berfokus pada pelaksanaan teknis pemilu, tetapi juga berupaya membangun kesadaran politik masyarakat agar mau menggunakan hak pilihnya.

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan unsur penting dalam sistem demokrasi. Dalam konteks demokrasi, partisipasi masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Sebagaimana dijelaskan bahwa partisipasi merupakan fungsi demokrasi, karena tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam proses politik maka demokrasi tidak dapat berjalan secara baik. Partisipasi masyarakat menjadi bentuk nyata keterlibatan warga negara dalam menentukan arah kebijakan publik dan kepemimpinan nasional.<sup>9</sup> Oleh sebab itu, upaya peningkatan partisipasi pemilih yang dilakukan oleh KPU memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

Hasil wawancara dengan Fahmi Failasopa menunjukkan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Selatan melakukan sosialisasi dengan berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan adalah pelaksanaan kirab pemilu dengan mengangkat kearifan lokal daerah, seperti kegiatan menyusuri sungai di wilayah bantaran sungai Kalimantan Selatan sambil membawa atribut partai politik dan

---

<sup>9</sup> Muhammad Irfan Ilmy et al., "Upaya KPU Kabupaten Sukabumi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Civic Hukum* 6, no. 2 (2021) hlm 169.

menyosialisasikan hari pemungutan suara. Strategi ini menunjukkan bahwa KPU berupaya mendekatkan proses sosialisasi dengan karakteristik budaya masyarakat setempat sehingga informasi pemilu dapat diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat.

Kegiatan sosialisasi oleh KPU Kalsel berpedoman pada fungsi dasarnya sebagai penyelenggara pemilu. UU No. 7 Tahun 2017 mengamanatkan KPU untuk menyebarluaskan informasi seluruh rangkaian pemilu serta profil paslon presiden dan wakil presiden kepada masyarakat.<sup>10</sup> Langkah ini mempertegas peran kelembagaan KPU Kalsel dalam mengoptimalkan partisipasi politik publik.

Pemanfaatan media sosial dan media massa juga menjadi salah satu strategi utama yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan wawancara dengan Hendry Gunawan, diketahui bahwa KPU secara aktif membuat berbagai konten kreatif yang mengikuti tren media sosial agar dapat menarik perhatian masyarakat, khususnya kalangan muda dan pemilih pemula. Selain itu, KPU juga memanfaatkan media elektronik seperti radio dan televisi, media cetak seperti baliho dan spanduk, serta pemberitaan media *online* untuk menyampaikan informasi pemilu kepada masyarakat. Strategi menunjukkan bahwa sosialisasi pemilu dapat dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi, baik secara langsung maupun melalui

---

<sup>10</sup> “UU No. 7 Tahun 2017,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 15 Mei 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.

media sosial, televisi, radio, dan media informasi lainnya guna meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan informan pemilih dan pemilih pemula, diketahui bahwa sebagian besar informasi mengenai jadwal pemilu, lokasi pencoblosan, serta informasi calon presiden diperoleh melalui media sosial dan media digital. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital oleh KPU cukup efektif dalam menjangkau kelompok pemilih muda. Bahkan beberapa informan menyatakan bahwa keberadaan baliho, pemberitaan *online*, serta kegiatan sosialisasi di ruang publik seperti kawasan Siring Banjarmasin membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan pemilu.

Selain melalui media digital, KPU juga melakukan kerja sama dengan berbagai stakeholder untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Berdasarkan wawancara dengan Hendry Gunawan, KPU bekerja sama dengan kampus, organisasi kepemudaan, sekolah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan pendidikan pemilih. Kerja sama tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi langsung, kegiatan nonton bareng film pemilu, diskusi, serta ajakan moral kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya. Upaya tersebut menyatakan bahwa peran pemerintah daerah dan stakeholder memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat.

Konsep *syura* dalam Islam juga memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pemilu sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam

menentukan pemimpin. Syura menekankan pentingnya musyawarah, pertukaran pendapat, dan keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan bersama demi mencapai kemaslahatan umum. Nilai tersebut terlihat dalam upaya KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, serta kelompok pemilih lainnya dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pelibatan berbagai unsur masyarakat tersebut menunjukkan bahwa proses demokrasi tidak hanya dilakukan secara formal melalui pemungutan suara, tetapi juga melalui ruang-ruang diskusi, edukasi, dan pertukaran pandangan yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu. Dengan demikian, upaya sosialisasi yang dilakukan KPU dapat dipandang sejalan dengan nilai syura dalam Islam, yaitu mendorong keterlibatan masyarakat secara bersama-sama dalam menentukan arah kepemimpinan dan masa depan bangsa.<sup>11</sup>

Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat juga memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam penelitian terdahulu dijelaskan bahwa tokoh agama sering kali memiliki pengaruh moral yang kuat terhadap masyarakat sehingga ajakan untuk menggunakan hak pilih dapat lebih mudah diterima oleh

---

<sup>11</sup> Rayhan Nadindra Alfatih and Tajul Arifin, "Pemilu dalam Perspektif Hadis Riwayat Al-Bukhari Mengenai Larangan Memilih Pemimpin yang Tidak Kompeten," *JURNAL RISET RUMPUN ILMU PENDIDIKAN* 4, no. 2 (2025): hlm 542.

masyarakat.<sup>12</sup> Hal ini terlihat dari strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui podcast bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat yang kemudian disebarakan melalui media sosial. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa KPU tidak hanya menggunakan pendekatan formal, tetapi juga pendekatan sosial dan kultural dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Pendidikan pemilih yang dilakukan KPU juga bertujuan membangun kesadaran masyarakat bahwa memilih bukan hanya sekadar hak, tetapi juga kewajiban moral dan konstitusional sebagai warga negara.<sup>13</sup> Kesadaran tersebut penting untuk membangun partisipasi politik yang berkelanjutan, khususnya bagi pemilih pemula yang baru pertama kali mengikuti pemilu. Berdasarkan wawancara dengan informan pemilih pemula, pengalaman pertama dalam menggunakan hak pilih memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi sehingga mendorong keinginan untuk kembali berpartisipasi pada pemilu berikutnya.

Pandangan Islam menempatkan partisipasi masyarakat sebagai elemen vital dalam pemilihan pemimpin, mengingat legitimasi kepemimpinan bersumber dari penilaian publik terhadap kapasitas

---

<sup>12</sup> Redi Pirmansyah dkk., *Redi Pirmansyah dkk., strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum serentak Tahun 2024 (CV. Adanu Abimata, 2023)* (CV. Adanu Abimata, 2023). Hlm 106.

<sup>13</sup> Muhammad Daniel Arifin et al., “Partisipasi Pemilih Dan Kualitas Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara,” *Journal of Public Administration and Management Studies* 3, no. 1 (2025): hlm 24.

calon, bukan ambisi individu. Prinsip ini melandasi berbagai langkah KPU Kalsel dalam meningkatkan kesadaran pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan politik, sehingga masyarakat mampu menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, maka proses pemilihan pemimpin tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi juga menjadi bentuk keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpin yang dianggap layak dan mampu menjalankan amanah kepemimpinan secara baik. Dalam konteks ini, upaya KPU untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat dapat dipahami sebagai bagian dari membangun kualitas partisipasi pemilih agar masyarakat tidak memilih secara sembarangan ataupun hanya berdasarkan kepentingan sesaat.<sup>14</sup>

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa upaya yang dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 telah dilakukan melalui berbagai strategi yang cukup beragam, baik melalui sosialisasi langsung, pendidikan pemilih, pemanfaatan media digital, maupun kerja sama dengan berbagai pihak. Strategi tersebut menunjukkan adanya upaya aktif dari KPU dalam membangun kesadaran politik masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

---

<sup>14</sup> Siti Hasanah et al., "Integrasi Nilai Pemilihan Pemimpin Dalam Islam Ke Dalam Sistem Pemilu Legislatif Di Indonesia," *Istinbath* 17, no. 1 (2018): hlm. 241.

**b. Peran KPU Provinsi dan Inovasi Koordinatif dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih**

KPU Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peran koordinatif dalam pelaksanaan peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden Tahun 2024. KPU Provinsi tidak bekerja sendiri, tetapi melakukan koordinasi dengan seluruh KPU Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan agar pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat berjalan secara maksimal di setiap daerah.

Fahmi Failasopa menjelaskan bahwa kewenangan KPU Provinsi lebih bersifat koordinatif, sedangkan pelaksanaan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat lebih banyak dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa secara fungsional KPU Provinsi memiliki tugas melakukan koordinasi, supervisi, dan pengendalian terhadap KPU Kabupaten/Kota serta membantu KPU pusat dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam praktiknya, masing-masing daerah memiliki inovasi tersendiri dalam melakukan sosialisasi. KPU Hulu Sungai Selatan menggunakan media podcast bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat, sedangkan daerah seperti Tanah Laut, Kotabaru, dan Hulu Sungai Utara lebih banyak melakukan sosialisasi langsung ke lapangan. Sementara itu, wilayah perkotaan seperti Banjarmasin dan Banjarbaru

---

<sup>15</sup> Perdana et al., *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*.

melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah melalui Kesbangpol untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Keberagaman strategi tersebut menunjukkan bahwa KPU berusaha menyesuaikan metode sosialisasi dengan karakteristik masyarakat di masing-masing daerah.

Selain melakukan sosialisasi, keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang tertib dan transparan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan informan pemilih dan pemilih pemula, diketahui bahwa proses pemungutan suara di TPS berjalan dengan tertib, lancar, dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Kondisi tersebut menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu sehingga mendorong partisipasi politik masyarakat untuk ikut memilih.

Partisipasi politik sendiri merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik.<sup>16</sup> Oleh sebab itu, KPU tidak hanya bertugas menyelenggarakan pemilu secara administratif, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ketika masyarakat merasa bahwa pemilu dilaksanakan secara jujur, tertib, dan transparan, maka

---

<sup>16</sup> Ilmy dkk., "Upaya KPU Kabupaten Sukabumi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19," 2021.

masyarakat akan lebih terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu.

Upaya yang dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Selatan juga menunjukkan bahwa pemilu bukan hanya sekadar kegiatan memilih pemimpin, tetapi merupakan sarana utama demokrasi untuk menentukan arah pemerintahan melalui partisipasi rakyat. Pemilu memiliki posisi penting dalam sistem demokrasi karena menjadi indikator utama keberhasilan demokrasi suatu negara.<sup>17</sup> Oleh karena itu, berbagai inovasi dan strategi yang dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih merupakan bentuk upaya menjaga kualitas demokrasi melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemilu.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan peran koordinatif dan inovatif dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden Tahun 2024. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota, pemanfaatan media digital, kerja sama dengan stakeholder, inovasi berbasis kearifan lokal, serta penyelenggaraan pemilu yang tertib dan transparan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

---

<sup>17</sup> Kasman Bakry dkk., *Sistem Politik Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). Hlm 45.

## **2. Kendala Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Presiden 2024**

### **a. Kendala Sosial dan Rendahnya Kesadaran Politik Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 berasal dari faktor sosial masyarakat itu sendiri. Kendala tersebut meliputi sikap apatis masyarakat terhadap pemilu, pola pikir pragmatis yang mengharapkan imbalan dalam memilih, rendahnya kesadaran politik masyarakat, serta menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pemimpin maupun penyelenggara pemilu.

Hasil wawancara dengan Fahmi Failasopa menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki pola pikir pragmatis dalam mengikuti pemilu. Sebagian masyarakat menganggap bahwa keikutsertaan dalam pemilu harus disertai dengan pemberian tertentu atau keuntungan pribadi. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih karena masyarakat tidak lagi memandang pemilu sebagai bentuk tanggung jawab demokratis, melainkan hanya sebagai sarana memperoleh keuntungan tertentu. Sikap pragmatis seperti ini menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat masih belum sepenuhnya terbentuk secara baik.

Kesadaran masyarakat terhadap pemilu dari tahun ke tahun cenderung mengalami perubahan. Sebagian masyarakat menjadi lebih kritis terhadap proses politik sehingga muncul kecenderungan untuk bersikap apatis atau tidak tertarik menggunakan hak pilih apabila merasa tidak memperoleh manfaat langsung dari proses politik tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi politik tidak hanya berkaitan dengan tersedianya informasi pemilu, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat memandang pentingnya keterlibatan mereka dalam proses demokrasi.

Selain sikap pragmatis, terdapat pula masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilih atau menjadi golongan putih (golput). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa sebagian masyarakat tidak menggunakan hak pilih karena merasa kurang peduli terhadap hasil pemilu ataupun menganggap satu suara tidak memberikan pengaruh besar terhadap perubahan politik. Fenomena ini menunjukkan adanya sikap apatis dalam masyarakat terhadap proses demokrasi.

Dalam teori sistem politik dijelaskan bahwa golongan putih merupakan kelompok masyarakat yang bersikap apatis terhadap sistem politik karena menilai sistem yang berjalan tidak sesuai dengan harapan mereka, sehingga memilih untuk tidak terlibat dalam proses politik.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Zamrisman and Umi Zanariyah, *Sistem Politik Indonesia* (Literasi Nusantara, 2024). Hlm 59.

Kondisi tersebut terlihat dari adanya informan yang menyatakan bahwa masyarakat cenderung tidak tertarik mengikuti pemilu apabila merasa tidak memperoleh manfaat langsung atau tidak percaya bahwa pemilu dapat membawa perubahan.

Dalam prinsip hukum Islam, pemilihan pemimpin harus dilaksanakan secara adil, bebas dari kecurangan, serta memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan maupun imbalan tertentu. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu seharusnya dilandasi oleh kesadaran moral dan tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang mampu membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Namun, berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang memiliki pola pikir pragmatis dengan mengharapkan imbalan ketika menggunakan hak pilihnya. Kondisi tersebut tentu bertentangan dengan prinsip pemilihan dalam Islam yang menekankan nilai keadilan, persamaan hak, serta amar makruf nahi mungkar dalam proses pemilihan pemimpin. Oleh karena itu, kendala sosial berupa rendahnya kesadaran politik dan sikap pragmatis masyarakat menjadi tantangan besar bagi KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam mewujudkan partisipasi pemilih yang tidak hanya tinggi secara kuantitas, tetapi juga berkualitas secara moral dan demokratis.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ardi Agis Utama, *Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Sistem Pemilihan Kepala Negara Di Republik Indonesia, Jurnal Diskresi*. Vol. 1, No. 1 (2022).

Selain itu, Hendry Gunawan juga menjelaskan bahwa terdapat sebagian masyarakat yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin maupun terhadap penyelenggara pemilu itu sendiri. Rendahnya kepercayaan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat enggan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Dalam konteks ini, persepsi masyarakat terhadap sistem politik memiliki pengaruh besar terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat.

Dalam partisipasi politik menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam politik sangat dipengaruhi oleh penilaian masyarakat terhadap sistem politik yang berjalan. Apabila masyarakat menilai bahwa sistem politik tidak berjalan sesuai harapan atau tidak mampu menghasilkan perubahan yang diinginkan, maka masyarakat cenderung memilih untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik. Dengan demikian, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses politik menjadi tantangan tersendiri bagi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Kendala lain yang juga ditemukan adalah rendahnya kesadaran politik masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu. Berdasarkan wawancara dengan informan golput, diketahui bahwa masih terdapat masyarakat yang kurang memahami pentingnya partisipasi dalam pemilu serta menganggap bahwa tidak memilih bukan merupakan suatu persoalan besar. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa kesadaran politik masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan pemilih yang lebih luas dan berkelanjutan.

Padahal, partisipasi politik tidak hanya sebatas aktivitas memberikan suara dalam pemilu, tetapi juga mencerminkan tingkat kesadaran politik masyarakat serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang berjalan. Oleh karena itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak hanya berdampak terhadap jumlah pemilih, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas demokrasi itu sendiri.

Dalam perspektif demokrasi, partisipasi masyarakat memiliki kedudukan yang sangat penting karena partisipasi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan demokrasi. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam pemilu, maka demokrasi tidak dapat berjalan secara optimal. Sebagaimana dijelaskan dalam teori bahwa partisipasi merupakan fungsi demokrasi karena kekuasaan dalam negara demokrasi harus selalu berorientasi pada keputusan publik yang melibatkan masyarakat. Oleh sebab itu, rendahnya partisipasi masyarakat dapat menjadi ancaman terhadap kualitas demokrasi apabila tidak diatasi secara baik.

Selain faktor apatis dan rendahnya kesadaran politik, terdapat pula masyarakat yang hanya bersedia mengikuti proses politik apabila memperoleh keuntungan tertentu. Dalam teori partisipasi politik dijelaskan bahwa partisipasi pasif merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang hanya berfokus pada hasil atau keuntungan tertentu

tanpa adanya keterlibatan aktif dalam proses politik. Kondisi ini terlihat dari adanya masyarakat yang hanya tertarik datang ke TPS apabila terdapat imbalan atau keuntungan yang diperoleh dari proses pemilu tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui bahwa kendala sosial dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 tidak hanya berasal dari faktor teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga berasal dari pola pikir dan kesadaran politik masyarakat itu sendiri. Sikap apatis, pragmatis, rendahnya kepercayaan terhadap sistem politik, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik menjadi tantangan utama yang dihadapi KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

#### **b. Kendala Teknis dan Keterbatasan Sosialisasi dalam Pelaksanaan Pemilu**

Selain kendala sosial, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala teknis dan administratif yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden Tahun 2024. Kendala tersebut meliputi masalah daftar pemilih tetap (DPT), proses pindah memilih, keterbatasan jangkauan sosialisasi, faktor geografis daerah pedalaman, serta keterbatasan anggaran sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fahmi Failasopa, diketahui bahwa permasalahan data pemilih masih menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Tidak semua masyarakat yang telah terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya karena adanya perbedaan domisili tempat tinggal dengan alamat pada kartu tanda penduduk. Kondisi tersebut banyak terjadi pada mahasiswa maupun pekerja yang tinggal di luar daerah asal sehingga tidak dapat hadir di TPS tempat mereka terdaftar sebagai pemilih.

Persoalan ini bersinggungan langsung dengan proses pemutakhiran data pemilih sebagai salah satu kewajiban utama KPU. Secara teoritis, KPU bertanggung jawab melakukan pemutakhiran data pemilih mengacu pada data kependudukan resmi, serta memastikannya agar setiap warga negara yang berhak memilih terakomodasi dengan baik dalam DPT.<sup>20</sup> Selain itu, KPU juga harus memastikan agar tidak terjadi kesalahan pendataan, baik masyarakat yang seharusnya terdaftar namun belum masuk DPT maupun masyarakat yang belum memenuhi syarat tetapi justru terdaftar sebagai pemilih.<sup>21</sup>

Hasil wawancara dengan informan golput menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama tidak digunakannya hak pilih adalah kesulitan dalam mengurus proses pindah memilih. Informan menganggap bahwa prosedur administratif pindah memilih cukup rumit

---

<sup>20</sup> Yana Suryana, *Penyelenggara Pemilu Di Indonesia* (Cempaka Putih, 2019). Hlm 38.

<sup>21</sup> Yana Suryana, *Penyelenggara Pemilu Di Indonesia* (Cempaka Putih, 2019). Hlm 45.

dan memerlukan waktu, sehingga akhirnya memilih untuk tidak menggunakan hak pilih. Bahkan terdapat informan yang tidak mengetahui secara jelas mengenai mekanisme pindah memilih serta batas waktu pengurusannya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek teknis dalam pelayanan pemilih masih menjadi kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Meskipun informasi umum mengenai pemilu telah tersedia, namun informasi teknis mengenai prosedur administratif seperti pindah memilih masih belum tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat yang berada di luar daerah saat hari pemungutan suara berpotensi kehilangan hak pilihnya karena tidak memahami prosedur yang harus dilakukan.

Selain kendala administratif, keterbatasan jangkauan sosialisasi juga menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Beberapa informan menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan KPU lebih banyak dilakukan melalui media sosial sehingga belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sebagian masyarakat bahkan mengaku tidak pernah mengikuti sosialisasi secara langsung maupun pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital memang efektif untuk menjangkau kalangan muda, tetapi belum tentu efektif untuk menjangkau seluruh kelompok masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap media sosial.

Dalam teori dijelaskan bahwa sosialisasi dan pendidikan pemilih memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu karena melalui sosialisasi masyarakat memperoleh pemahaman mengenai tata cara dan pentingnya menggunakan hak pilih. Oleh sebab itu, apabila sosialisasi belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata, maka tingkat partisipasi pemilih juga berpotensi mengalami penurunan.

Kendala lain yang juga ditemukan adalah faktor geografis wilayah Kalimantan Selatan, khususnya daerah pedalaman yang sulit dijangkau. Berdasarkan wawancara dengan Hendry Gunawan, diketahui bahwa terdapat beberapa wilayah yang memiliki keterbatasan akses informasi maupun akses menuju TPS akibat kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi pemilu maupun untuk hadir secara langsung pada hari pemungutan suara.

Peningkatan partisipasi pemilih tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah daerah dan stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan pemilu, terutama pada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan geografis. Dengan demikian, peningkatan partisipasi pemilih di daerah pedalaman memerlukan kerja sama yang lebih luas antara KPU, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan berbagai pihak lainnya agar informasi pemilu dapat menjangkau masyarakat secara merata.

Selain itu, Fahmi Failasopa juga menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu. Anggaran sosialisasi sebagian besar hanya tersedia pada tingkat KPU Kabupaten/Kota dan belum sepenuhnya menjangkau tingkat kecamatan maupun desa. Akibatnya, pelaksanaan sosialisasi di wilayah pedesaan masih belum maksimal dan terdapat masyarakat yang belum memperoleh informasi secara langsung mengenai pemilu.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui bahwa kendala teknis dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 meliputi permasalahan administrasi pemilih, keterbatasan layanan pindah memilih, kurang meratanya sosialisasi, faktor geografis daerah pedalaman, serta keterbatasan anggaran pelaksanaan sosialisasi. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi pemilih tidak hanya memerlukan kesadaran politik masyarakat, tetapi juga memerlukan sistem pelayanan pemilu dan penyebaran informasi yang lebih efektif serta mudah diakses oleh seluruh masyarakat.